



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
UNIT KERJA : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IRWAN DUWILA
2. Jabatan : KEPALA SUB BIDANG KETAHANAN KEMASYARAKATAN DAN AGAMA
3. NHK : 814012

II. DATA HARTA

| | | |
|--|-----|-------------|
| A. TANAH DAN BANGUNAN | Rp. | 130.000.000 |
| 1. Tanah dan Bangunan Seluas 193 m2/135 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000 | | |
| B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN | Rp. | 62.500.000 |
| 1. MOTOR, HONDA NF100/SOLO Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000 | | |
| 2. MOBIL, TOYOTA AVANZA 1300 E Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000 | | |
| C. HARTA BERGERAK LAINNYA | Rp. | --- |
| D. SURAT BERHARGA | Rp. | --- |
| E. KAS DAN SETARA KAS | Rp. | 3.500.000 |
| F. HARTA LAINNYA | Rp. | --- |
| Sub Total | Rp. | 196.000.000 |

III. HUTANG Rp. 46.000.008

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 149.999.992

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.



3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

